

KLIPING BERITA

4 - 6 JUNI 2022



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KLIPING BERITA



Nama Media : Harian Singgalang

Sejumlah Kuda Pacuan Mulai Latihan di Banca Laweh

PADANG PANJANG - Kuda pacuan yang berasal dari sejumlah daerah di Sumatera Barat, mulai berdatangan dan menjajal lintasan pacuan kuda Banca Laweh.

Terlihat, para joki yang menunggangi kuda itu melakukan latihan sebagai persiapan menuju event akbar Pacu Kuda Alek Anak Nagari Padang Panjang, Batipuah, X Koto (Pabasko), akhir Juni mendatang. Latihan dimulai 07.30-09.00 WIB.

Ketua Panitia Pacu Kuda, Delius Putra mengatakan, kuda yang mulai datang itu diantaranya dari Solok, Bukittinggi dan Payakumbuh. Sementara yang mulai menjajal latihan yaitu dari Kota Padang dan Kota Padang Panjang.

"Di minggu-minggu ini, kuda pacuan mulai berdatangan dan akan melakukan latihan setiap harinya jelang event akbar itu. Hari ini dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) juga melakukan survey track pacuan. Mungkin ada perbaikan-perbaikan sebelum acara," katanya.

Dikatakannya lagi, sebanyak 18 kuda sudah datang dari 50 kuda yang akan bertanding pada pacuan kuda nantinya.

"Jumlahnya akan bertambah jelang event nanti. Pada pacuan kuda itu, joki kuda setiap daerah akan menggunakan warna khas masing masing. Padang Panjang memakai warna hijau, Batusangkar Kuning, dan Agam Merah. Ini akan menarik. Jadi, dari warna baju orang akan tahu," ujarnya. (205)



Nama Media : Harian Posmetro Padang

35 Santri TPQ-TPSQ Masjid Raya Jihad Khatam Al Quran

PADANG PANJANG, METRO

Masjid Raya Jihad kembali menggelar Khatam Al Qur'an, Sabtu (04/6). Acara ini diberi tema "Melalui Khatam Al Qur'an Kita Tingkatkan Minat Baca Al Qur'an dan Melahirkan Generasi yang Qur'ani".

Kegiatan Khatam Al Qur'an periode tahun 2022 kali ini, diikuti sebanyak 35 santriwan dan santriwati TPQ-TPSQ.

Wakil Kepala TPQ-TPSQ Masjid Raya Jihad, Ismet S.Iq, S.Ag mengatakan, Khatam Al Qur'an adalah sebagai wujud cinta Al Qur'an yang memiliki makna yang besar bagi umat Islam.

"Makna pertama dalam kata Iqra' yang artinya 'bacalah', adalah bagaimana kita membaca Al Qur'an dengan baik dan benar serta mengkhatamkannya. Kemudian makna berikutnya adalah mentadaburinya, mempelajari makna dan artinya, serta makna yang paling utama adalah mengamalkannya," katanya.

Ditambahkannya, TPQ-TPSQ Masjid Raya Jihad secara rutin tiap tahun membuat program Khatam Al Qur'an guna memberikan apresiasi bagi santri yang Khatam Al Qur'an. Serta memberikan motivasi agar selalu semangat melakukan tilawah Al Qur'an.

"Khatam Al Quran ini terselenggara berkat kerja sama antara guru dan pengurus TPQ-TPSQ bersama para orang tua santri dan beberapa donatur. Semoga ke depan, Khatam Al Qur'an Masjid Raya Jihad selalu terselenggara dengan baik," pungkas Ismet.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako, Erwina Agreni, M.Si yang turut hadir pada kegiatan tersebut mengapresiasi TPQ-TPSQ Masjid Raya Jihad yang telah menyelenggarakan Khatam Al Quran.

"Acara ini luar biasa. Saat prosesi Khatam Al Qur'an, acara pemasangan mahkota dan meminta keridhaan dan mohon maaf kepada orang tua, itu sangat menyentuh. Tolong ini dipertahankan," ungkapnya/ (rmd)

Sejumlah Kuda Pacuan Mulai Latihan di Bancalaweh

PADANG PANJANG, METRO

Kuda pacuan yang berasal dari sejumlah daerah di Sumatera Barat, mulai berdatangan dan menjajal lintasan pacuan kuda Bancalaweh.

Terlihat, para joki yang menunggangi kuda itu melakukan latihan sebagai persiapan menuju event akbar Pacu Kuda Alek Anak Nagari Padang Panjang, Batipuah, X Koto (Pabasko), 22 hari mendatang. Latihan dimulai 07.30-09.00 WIB.

Ketua Panitia Pacu Kuda, Delius Putra mengatakan, kuda yang mulai datang itu di antaranya dari Solok, Bukittinggi dan Payakumbuh. Sementara yang mulai menjajal latihan yaitu dari Kota Padang dan Kota Padang Panjang.

"Di minggu-minggu ini, kuda pacuan mulai berdatangan dan akan melakukan latihan setiap harinya jelang event akbar itu. Hari ini dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) juga melakukan survey track pacuan. Mungkin ada perbaikan-perbaikan sebelum acara," katanya.

Dikatakannya lagi, sebanyak 18 kuda sudah datang dari 50 kuda yang akan bertanding pada pacuan kuda nantinya.

"Jumlahnya akan bertambah jelang event nanti. Pada pacuan kuda itu, joki kuda setiap daerah akan menggunakan warna khas masing masing. Padang Panjang memakai warna hijau, Batusangkar Kuning, dan Agam Merah. Ini akan menarik. Jadi, dari warna baju orang akan tahu," ujarnya. (rmd)

Pemko Terima Dana Bagi Hasil Pajak Rp3,1 M dari Pemprov Sumbar

PDG.PANJANG, METRO

Kepatuhan dan ketepatan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat, terutama dalam membayar pajak kendaraan dinas, mendapatkan reward dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar. Pemko Padang Panjang mendapatkan dana bagi hasil pajak dari Pemprov senilai Rp3,1 miliar.

Kota Padang Panjang, termasuk dari tujuh kabupaten/kota yang berhasil mencapai target dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor milik pemerintah yang berujung pada penyerahan dana bagi hasil ini.

Penyerahan dana bagi hasil pajak tersebut, diterima Wakil Wali Kota, Drs. Asrul yang didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Dr. Winarno, M.E, Kepala Kantor UPTD Samsat Padang Panjang, Mistar, S.Sos, MM dari Gubernur Sumbar, H. Mahyeldi, S.P Datuak Marajo. Dana diserahkan dalam acara Penyerahan SK Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan I tahun 2022 dan Launching Inovasi Samsat Wisata serta Sam-

sat Terminal di Pelataran Jam Gadang Bukittinggi, Sabtu (4/6).

Wawako Asrul menyampaikan, Kota Padang Panjang merupakan daerah yang ketiga mencapai realisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam melaporkan pembayaran pajak kendaraan milik pemerintah kepada Pemprov.

"Dana kita dapatkan hari ini merupakan buah kerja keras semua pihak yang ada di Pemko termasuk Samsat. Semoga hal ini dapat memotivasi masyarakat dalam membayarkan pajak. Sebab bagaimanapun juga, pajak merupakan kewajiban kita kepada negara," kata Asrul.

Dana bagi hasil pajak dari provinsi, lanjut Asrul, disalurkan kepada kabupaten/kota apabila telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak milik Pemerintah Kabupaten/Kota minimal 90% pada triwulan tahun berkenaan.

Kepala Dinas Pendapatan Sumbar, Maswar Dedi, A.P, M.Si dalam laporannya menyampaikan, penyerahan dana bagi hasil hanya diserahkan kepada tujuh

daerah. Ini lantaran dinilai dari 19 kabupaten/kota yang ada, tujuh daerah ini yang telah sesuai dengan regulasi serta memenuhi kriteria untuk diserahkan dana bagi hasil. Selain Padang Panjang, yaitu Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi, Pariaman, Solok, Kabupaten Sijunjung dan Tanah Datar.

"Sesuai dengan Pergub No 11 Tahun 2018 Pasal 13 Ayat 5, menyebutkan bahwa dana bagi hasil pajak provinsi dapat disalurkan kepada kabupaten/kota apabila pemerintah kabupaten/kota telah menyelesaikan kewajibannya dalam membayar pajak milik Pemkab/Pemko minimal 90 persen dalam tahun berkenaan. Maka dengan demikian, diucapkan terima kasih kepada tujuh kabupaten/kota yang telah melaksanakan kewajibannya dengan kerja keras sehingga mampu mencapai target yang ditentukan," jelas Maswar.

Sementara itu, Gubernur Mahyeldi menyampaikan, pemerintah seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal pembayaran pajak ken-



PENGHARGAAN—Gubernur Sumbar Mahyeldi serahkan tanda penghargaan kepada Wakil Wali Kota Padangpanjang, Drs. Asrul atas keberhasilan yang diraih.

daraan bermotor milik pemerintah. Bagaimana bisa masyarakat patuh dalam membayar pajak, jika pemerintahnya sendiri lalai dalam membayarkan pajaknya.

"Tujuh pemerintah kabupaten/kota telah bekerja dengan baik dalam membayar pajak milik pemerintah, maka sudah seharusnya Pemprov memberikan apresiasi maksimal kepada daerah tersebut, dengan menyerahkan dana bagi hasilnya. Diharapkan 12 kabupaten/kota lainnya juga dapat mencontoh keseriusan dari tujuh kabupaten/kota yang mendapat dana bagi hasil pada hari ini," papar Mahyeldi. (rmd)



KLIPING BERITA PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nama Media : Harian Posmetro Padang

Mitigasi Bencana, Polres, BPBD dan Satpol PP Damkar Gelar Latihan Bersama

PDG.PANJANG, METRO

Guna kesiapsiagaan, mitigasi dan penanganan bencana alam, Polres, BPBD Kesbangpol dan Satpol PP Damkar Kota Padang Panjang menggelar latihan bersama di lapangan Bancalaweh, Kamis (2/6).

Kapolres melalui Kasi Humas, AKP. Asril Jumat (3/6) menyampaikan, latihan bersama kompetensi dalam penanganan bencana alam merupakan salah satu Program Prioritas Kapolri yaitu kegiatan 32 tentang penanggulangan bencana alam.

"Kemarin, dari Polres diikuti beberapa pasukan dari Satuan Samapta. Tujuan latihan ini untuk dapat menangani bencana dengan cepat serta terintegrasi apabila sewaktu-waktu terjadi di wilayah hukum Polres Padang panjang," kata Asril.

Lebih lanjut Asril mengungkapkan, wilayah Padang Panjang mempunyai karakteristik alam pegunungan dan perbukitan yang tidak menutup kemungkinan terjadinya bencana alam seperti tanah long-



rahmad/posmetro

LATIHAN BERSAMA— Tim SAR dan tim gabungan saat latihan bersama kompetensi dalam penanganan bencana alam merupakan salah satu Program Prioritas Kapolri.

sor, kebakaran dan lainnya. "Kita harus bersinergi dan bekerja sama untuk menanggulangnya dan mempersiapkan segala macamnya jika terjadi bencana. Kita juga berharap

semoga Padang Panjang dijauhkan dari bencana," harapnya. Kegiatan ini diawali dengan apel bersama yang dihadiri Kasat Samapta, Iptu Muslim, Kasat Pol PP

Damkar, Drs. M. Alber Dwitra, M.M, Kabid Damkar Jhon Eriko, S.Sos, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kesbangpol, Doni Rahman, S.Pd.I, M.Pd. (rmd)

Kominfo dan Komisi III DPRD Kota Padang Kunjungi Kominfo Padangpanjang

PDG.PANJANG, METRO

Sharing informasi terkait penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Komisi III DPRD Kota Padang kunjungi Kominfo Padang Panjang, Kamis (2/6). Saat menyambut rombongan yang terdiri dari 11 anggota dewan tersebut di ruang kerjanya, Kepala Kominfo Padang Panjang, Drs. Ampera Salim, S.H, M.Si menyampaikan, sebagai salah satu alat menambah PAD, Pemko melalui Kominfo telah menyediakan alat promosi media luar ruang (videotron). "Videotron yang kami kelola ini terletak di tempat strategis di persimpangan PDAM, di depan Balai Kota dan di perempatan Ponpes Serambi Mekkah," sebutnya.

Dikatakannya, sebagai penambah PAD, videotron merupakan sarana yang bisa digunakan untuk mempromosikan produk agar



rahmad/posmetro

KUNJUNGAN— Kepala Kominfo Padang Panjang, Drs. Ampera Salim, S.H, M.Si saat menerima tamunya dari Kota Padang.

bisa diketahui masyarakat luas. "Berbagai perusahaan dan UKM telah beriklan di videotron tersebut," ungkapnya. Sedangkan terkait penarikan retribusi menara telekomunikasi, sebut Ampera, saat ini pihaknya belum melakukannya. "Ke depan kami akan siapkan perda me-

ngenai menara telekomunikasi ini," ujarnya. Sementara itu, Kepala Bidang INTI Kominfo Padang, Burdefira, S.Kom, M.Cio menyampaikan, untuk retribusi menara telekomunikasi dan tower, guna memudahkan pengelola membayar retribusi secara cepat dan efisien,

Pemko Padang meluncurkan aplikasi e-Payment. "Dengan aplikasi ini, pengelola tower cukup mengakses aplikasi towertel. padang.go.id lalu akan tercantum berapa nilai retribusi. Kemudian mentransfer lewat rekening virtual dan langsung masuk ke kas daerah," terangnya. (rmd)

Disdukcapil Ajak ASN Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Adminduk

PDG.PANJANG, METRO

Dalam kegiatan wirid Korpri rutin yang diikuti ASN di lingkungan Pemko Padang Panjang, Jumat (3/6) di Islamic Center, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mengajak ASN untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan (Adminduk).

Kepala Disdukcapil, Dra. Maini, M.M menyampaikan pentingnya dokumen, data kependudukan, dan manfaatnya.

Dikatakannya, untuk

dokumen kependudukan secara nasional, kita sudah di atas target. Namun masih ada yang belum maksimal yaitu dokumen Kartu Identitas Anak (KIA). Dari 18.441 anak usia 0 sampai 17 tahun kurang satu hari, sudah 85 persen yang sudah memiliki KIA ini.

"Karena KIA ini adalah KTP anak-anak yang harus dibawa ke manapun, kami berharap kepada kita bersama untuk dapat menyampaikannya kepada masyarakat akan pentingnya KIA ini. Untuk KIA sebenarnya Padang Panjang

sudah diatas target nasional juga. Nasional 40 persen, kita sudah 85 persen. Namun harapan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk Padang Panjang diharapkan akhir tahun 2022 ini di atas 95 persen. Ini yang akan kita tingkatkan," ungkapnya.

Ia berharap, melalui dukungan semua lapisan masyarakat, pihaknya akan berupaya dengan berbagai strategi untuk layanan KIA kepemilikannya bisa di atas 95 persen di Kota Padang Panjang. (rmd)



Nama Media : Harian Posmetro Padang

Di Hadapan Peserta ISPE

Wako Fadly Amran Paparkan Program Papa Bangkid'21 untuk Upgrade UMKM

DENPASAR, METRO

Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano mendapat aplaus meriah dari peserta Forum Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 di Denpasar Bali, Jumat (3/6). Hal ini terkait dengan pemaparannya sebagai salah satu narasumber utama di ajang yang digelar Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) bekerja sama dengan Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) itu.

Mengangkat tema tentang penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui program Papa Bangkid'21 (Padang Panjang Bangun Pascaco-

vid tahun 2021-red), Wako Fadly tampil sepinggung bersama Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, dan Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi LK-PP, Gatot Pambudi Putranto, serta Faisal Hasan Basri, Sekjen Komunitas Sahabat UMKM.

Dalam kesempatan itu, Fadly Amran memaparkan dengan runtut bagaimana Pemko Padang Panjang di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota, Drs. Asrul serius mengangkat dan meng-upgrade UMKM supaya dapat bersaing dan sekaligus meningkatkan produktivitas



UTAMA—Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano nara sumber utama di ajang yang digelar Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) bekerja sama dengan Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN).

ekonomi kerakyatan ini. Mulai dari kreatifitas, inovasi dan kolaborasi penguatan UMKM yang dilakukan Pemko dipresenta-

sikan wali kota muda itu di hadapan peserta ISPE.

"Beberapa strategi khusus yang dilakukan berkaitan dengan pengem-

bangun UMKM di Padang Panjang, antara lain melalui program Papa Bangkid 21, dengan beberapa kebijakan. Di antaranya permodalan, fasilitasi izin usaha dan merek dagang, pemberdayaan tenaga kerja, penguatan manajemen, dan fasilitasi pemasaran," paparnya.

Selain itu, kata Fadly, kolaborasi juga dibangun Pemko Padang Panjang dalam penguatan UMKM ini sebagai upaya membangkitkan ekonomi pascapandemi. Yaitu dengan berkolaborasi bersama perguruan tinggi, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota lainnya. Juga berkolaborasi dengan pihak perbankan dan penyedia platform marketplace, serta stakeholder terkait lainnya di Kota Padang Panjang.

Fadly juga memaparkan beberapa data konkret tentang perkembangan UMKM tahun 2020-2021 saat Covid-19 mewabah. Beberapa strategi khusus dalam menangani dampak pandemi Covid-19 terhadap kemajuan UMKM, tantangan besar UMKM Padang Panjang dalam menghadapi arus globalisasi ekonomi dan sebagainya.

Acara ini diikuti seluruh wali kota se-Indonesia yang tergabung dalam Apeksi dan para pelaku usaha pengadaan seluruh Indonesia. Turut mendampingi, Kabag Tata Pemerintahan Setdako, Drs Reflis, MTP dan Tim Percepatan Pembangunan, Dr. Haris Satria, M.Sn. (rel/ped)



Nama Media : Harian Padang Ekspres

65 Persen Tamatan SMP IT Al Hijrah Diterima di SMA Favorit

Padangpanjang, Padek—Sekitar 65 persen dari 34 orang tamatan SMP IT Al Hijrah Padangpanjang tahun ini, diterima di SMA/MA favorit Sumbar. Di antaranya, di SMAN 1 Sumbar, SMAN 1 Padangpanjang (asrama), MAPK-MAN 2 Padangpanjang dan MAN 1 Bukittinggi. Hebatnya lagi, dominan mereka hafal Quran 5-9 juz.

Hal itu terungkap dari laporan Kepala Sekolah SMP IT Al Hijrah Padangpanjang Imaamul Muttaqin, pada acara penyerahan kembali 34 orang lulusan SMP IT Al Hijrah kepada orangtua di kampus sekolah tersebut, Siliangbawah, Kota Padangpanjang, beberapa waktu lalu.

Alumni 2022 SMP IT Al Hijrah Padangpanjang yang diterima lewat PPDB pada SMAN 1 Sumbar itu sebanyak empat orang. Yakni Muhammad Hizam, Owen Tumena, M. Fadhel Arsyad dan Muhammad Abduh. Di SMAN 1 Padangpanjang ada tiga orang. Terdiri dari Ihsanul Hamdi, Tegul Arko Miraj, dan M. Aqil Baraaq Badruddin.

Sedang di MAPK MAN-2 Padangpanjang, sebanyak tiga orang. Yakni M. Tsaqif Najwan, Al Azhar Asy Syarif dan Imam Habibullah Al Fajri. Contoh SMTA favorit lain yang berhasil mereka masuki, seperti SMAN 3 Painan sebanyak dua orang.

Mereka yang diterima di



BERKUALITAS: Pelajar SMP IT Al Hijrah Padangpanjang dalam acara Perpisahan dan Wisuda Tahfiz Angkatan IV, beberapa waktu lalu.

SMA dan MA favorit Sumbar (Sumatera Barat) itu umumnya memiliki hafalan Quran 5-9 juz. Muhammad Hizam, misalnya, yang diterima pada SMAN 1 Sumbar, SMA unggul Sumbar yang berkampus cukup megah di Sigando, Kota Padangpanjang itu, memiliki hafalan 9 juz.

Capaian prestasi alumni tahun 2022 SMP IT Al Hijrah itu tidak saja disambut rasa syukur dan haru oleh wali murid. Juga mendapat pujian dan apresiasi dari Kepala Kemenag Kota Padangpanjang, diwakili stafnya Pasmu Dedi serta Novaljeri dari Dinas Pendidikan setempat. Keduanya berharap prestasi ini dapat ditingkatkan.

Harapan senada juga disampaikan Emir Emil El Maulid, ketua Pembina Yayasan Pembangunan Daerah, yang menaungi SMP IT Al Hijrah. Untuk itu kepala sekolah dan guru hendaknya bisa lebih fokus ke upaya peningkatan

prestasi tersebut. Soal upaya memenuhi kebutuhan sarana-prasana sekolah, itu tanggungjawab yayasan dan Pembina.

Terkait sarana-prasarana penunjang pada SMP IT Al Hijrah, Ketua Yayasan Pembangunan Daerah Rizal Hidayat menyebut, memang ada beberapa kebutuhan yang mendasak. Di antaranya, kata pensiunan Asisten I Setdako Padangpanjang itu, pertama, pembangunan pagar kompleks sekolah, terutama dibagian pinggir kompleks yang dekat ke tepi tebing.

Kedua, pembangunan jalan masuk kampus SMP Al Hijrah dari tepi jalan raya Padang-Bukittinggi/Solok itu. Sebab, selama ini jalan masuk ke kampus SMP Al Hijrah masih lewat jalan pemukiman warga yang lebarnya agak sempit. Ketiga, adanya bagian teping tepi kompleks sekolah yang perlu didam. (rel)



RAMAH ANAK: Salah satu ruang bermain ramah anak didirikan Pemko Padangpanjang dari sejumlah yang tersebar di tiap kelurahan.

Padangpanjang Optimis Kategori Utama KLA

Padangpanjang, Padek—Selama empat tahun terakhir meraih predikat Madya, Pemko Padangpanjang pada 2022 ini optimis capai kategori Utama sebagai Kota Layak Anak (KLA) usai mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) baru-baru ini.

Kepala Bappeda sekaligus Ketua Gugus Tugas KLA Kota Padangpanjang, Rusdianto mengungkapkan optimisme tersebut seiring dengan langkah dan kebijakan strategis yang diterapkan secara masif berbagai pihak terkait.

"Secara umum kebijakan Pemko yakni mewujudkan fasilitas dan infrastruktur yang layak anak, di antaranya seperti sekolah, taman, tempat perbelanjaan, dan rumah ibadah. Targetnya seperti diharapkan Pak Wali Kota, anak-anak kita ini bisa mendapatkan fasilitas dan kenyamanan hidup di Kota Padangpanjang," ucap Rusdianto melalui selularnya, Minggu (05/06) kemarin.

Terkait dengan kebijakan strategis tersebut, Rusdianto mengaku dimulai dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif, inovatif dan partisipatif. Langkah tersebut ditujukan meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, serta peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

"Secara programnya dilakukan pemenuhan hak dan meningkatkan kualitas terhadap anak, guna mencapai in-

dikator persentase forum anak yang aktif dan Indikator KLA yg terpenuhi sesuai standar," papar Rusdianto.

Sedangkan gambaran KLA Kota Padangpanjang yang merujuk pada 5 klaster dan kecamatan/kelurahan layak anak, berkaitan dengan haksipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan klaster terakhir berupa perlindungan khusus.

Klaster I berupa hak sipil dan kebebasan tersebut dika-takannya, diantaranya berkaitan dengan kemudahan layanan administrasi kependudukan, layanan informasi, ketersediaan media atau ruang partisipasi dan kegiatan serta keterlibatan kegiatan formal pemerintah.

Pada klaster II yang berkaitan dengan lingkungan keluarga, yakni tentang pencegahan perkawinan usia anak yang dilakukan melalui kampanye pendewasaan usia perkawinan dengan pemilihan duta GenRe, serta peningkatan kader Tibrina (BKB, BKR dan BKL).

"Sedangkan pada klaster III berkaitan pelayanan kesehatan ramah anak, klaster IV menciptakan sekolah ramah anak dan klaster V mendirikan lembaga penyedia layanan dan perlindungan khusus anak seperti Rumah Healing, LK3 Raudah, PUSPAGA dan Satgas PPA serta lainnya," pungkas Rusdianto. (wrd)



Nama Media : Harian Padang Ekspres

PDAM Terus Pacu Kemampuan Individu Karyawan

Padangpanjang, Padek—Upaya mewujudkan layanan maksimal terhadap pelanggan, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padangpanjang terus pacu keahlian karyawan.

Kepala Bagian (Kabag) Teknik PDAM Padangpanjang, Alhadi mengatakan terhadap 42 karyawan diberikan pelatihan *operating system* sejumlah aplikasi standar administrasi. Kegiatan yang terutama diberikan terhadap karyawan teknis lapangan tersebut, ditujukan untuk menekan tingkat ketergantungan individu karyawan dalam berbagai kepentingan standar administrasi. "Meski mereka intensitas kerjanya menangani sisi teknis pelayanan pendistribusian air terhadap pelanggan, untuk urusan

administrasi yang berkaitan dengan pelaporan dan usulan kebutuhan dapat dikerjakan sendiri secara baik dan terukur," ucap Alhadi di ruangan kerjanya, Jumat (3/6).

Alhadi menegaskan untuk mencapai hasil maksimal, peserta dibagi dalam empat kelas selama kegiatan 2-3 Juni. Peserta merupakan karyawan teknik, yang selama ini ketergantungan rekan kerja lainnya untuk urusan laporan dan pengajuan anggaran kerja.

"Ke depan mereka tidak lagi tergantung bantuan karyawan lainnya. Sehingga kinerjanya meningkat dalam segi efektivitas waktu dan kualitas capaian kerja. Muaranya, pelayanan PDAM secara umum juga lebih maksimal di setiap lini," pungkas Alhadi. (wrd)



DILATIH: Karyawan bagian teknis lapangan diberikan pelatihan administrasi. ^{IST}



KLIPING BERITA

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nama Media : Harian Haluan

WAKILI PADANG PANJANG

3 Siswa Lulus Paskibra Tingkat Provinsi



TERKAIT PELAYANAN - Kegiatan Public Hearing Standar Pelayanan pada Disdukcapil Kota Padang Panjang. APIZRAJUALAM

Wawako Asrul Minta Pelayanan Publik Lebih Baik

PADANG PANJANG, HALUAN - Memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan gratis, Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), menyelenggarakan *Public Hearing* Penyusunan Standar Pelayanan, di Aula Lantai 3 Balai Kota Padang Panjang, Kamis (2/6).

Saat membuka kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Padang Panjang, Drs. Asrul meminta setiap penyelenggara layanan publik berkomitmen dan konsisten dalam memberikan layanan publik yang

baik. Penyelenggara layanan publik, juga perlu menetapkan standar pelayanan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

"Hendaknya standar pelayanan publik mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan dan berkeadilan," ujar Asrul saat membuka kegiatan *Public Hearing* Standar Pelayanan Publik.

Dalam kesempatan itu, Asrul juga berharap, dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, nilai indeks pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil (Disdukcapil) Kota Padang Panjang dapat kembali meraih nilai A.

Sementara, Kepala Disdukcapil, Dra. Maini, M.M menyebutkan, standar pelayanan dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

"Ini sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur," jelasnya.

Hadir sebagai fasilitator, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, Adel Wahidi. Dalam pe-

nyampaiannya, Adel berharap nilai standar kepatuhan pelayanan Kota Padang Panjang dapat kembali "hijau" atau kategori Baik.

Adel menjelaskan, ada enam aspek utama evaluasi pelayanan publik. Di antaranya kebijakan pelayanan publik, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik (SIPP), mekanisme konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik. Pada tahun 2016, Kota Padang Panjang masuk kategori hijau. Namun pada tahun 2021 turun, masuk kategori kuning.

"Diharapkan kepada OPD pelayanan publik seperti Disdukcapil, DPMP-TSP, Dinkes, Disdik dan RSUD dapat meningkatkan kepatuhan pelayanan publik," harap Adel.

Kegiatan ini dihadiri kepala OPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan ormas, mahasiswa dan wartawan. Acara ini juga dirangkai dengan penandatanganan Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan Publik yang ditandatangani perwakilan dari Bank Nagari, akademisi dan ketua KNPI disaksikan Wawako Asrul. (h/pis)

PADANG PANJANG, HALUAN Tiga orang siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Padang Panjang, akan menjadi Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) pada HUT RI ke 77 untuk Tingkat Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) tanggal 17 Agustus mendatang.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Porapar) Kota Padang Panjang, Maiharman mengatakan, dari 4 orang siswa Padang Panjang yang diutus untuk mengikuti seleksi Paskibra tingkat Provinsi, 3 orang sudah dinyatakan lulus seleksi dan akan mengikuti latihan bersama siswa se-Sumbar lainnya.

"Tiga orang siswa Padang Panjang yang akan tergabung dalam Paskibra Sumbar yakni, Aulia Armanda Putri siswi SMA N 1 Padang Panjang, Najwa Safira Syadam siswi SMAN 1 Sumbar, dan Sulthan Daffa Alfareza siswa SMAN 1 Sumbar," ungkap Maiharman.

Maiharman berharap, para siswa asal Padang Panjang yang mengikuti Paskibra Sumbar nanti dapat menorehkan prestasi yang baik dan mampu mengharumkan nama Padang Panjang di Provinsi Sumbar.

"Terus Semangat menjalani latihan, dan jaga selalu kesehatan, agar mampu mempersembahkan yang terbaik dalam Paskibra Sumbar nanti," pesan Maiharman untuk para siswa yang lulus seleksi Paskibra Sumbar itu.

Selain itu, lanjut Maiharman, untuk tingkat Kota Padang Panjang, Disporapar juga telah menggelar seleksi para siswa yang akan bergabung menjadi Paskibra Kota Padang Panjang.

"Untuk di Padang Panjang kita telah lakukan seleksi, dan sudah terpilih sebanyak 65 siswa yang akan menjadi Pasukan Pengibar Bendera nantinya," tuturnya.

Dari 65 orang siswa itu, lanjut Maiharman, 32 merupakan pasukan laki-laki dan 33 pasukan wanita. Selain itu, Paskibra Kota Padang Panjang juga akan melibatkan 12 orang Personil dari TNI dan Polri.

"Kami akan rencanakan untuk memulai latihan Paskibra mulai tanggal 25 Juli mendatang di lapangan Anas Karim (lapangan Kantin) Kota Padang Panjang. Untuk pelatihannya, selain dari Purna Paskibra Indonesia (PPI) juga akan melibatkan Personil TNI, Polri dan Sar-Pol PP Kota Padang Panjang," kata Maiharman. (h/pis)



Nama Media : Harian Rakyat Sumbar

Padangpanjang Tanahdatar

Rakyat Sumbar
SENIN 6 JUNI 2022 11



SEORANG Joki sedang menunggangi kuda pacuannya melakukan latihan jelang pelaksanaan Alek Nagari Pacu Kuda pada 26 Juni mendatang.

Belasan Kuda Pacuan Mulai Jajal Lintasan

Delius Putra ; 50 Kuda Pacuan akan Bertanding

JON KENEDI

Harian Rakyat Sumbar

Jelang pelaksanaan Pacu Kuda Padangpanjang Batipuh dan X Koto (Pabasko) yang akan dilaksanakan pada 26 Juni mendatang, sejumlah kuda pacuan dari berbagai daerah sudah berdatangan dan menjajal lintasan pacuan kuda Bancalaweh.

KETUA Panitia Pacu Kuda Pabasko Delius Putra mengatakan, kuda yang mulai datang itu di antaranya dari Solok, Bukittinggi dan Payakumbuh. Sementara

yang mulai menjajal latihan yaitu dari Kota Padang dan Kota Padangpanjang.

"Di minggu-minggu ini, kuda pacuan mulai berdatangan dan akan melakukan

latihan setiap harinya jelang event akbar itu. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) juga telah melakukan survey track pacuan. Mungkin ada perbaikan-perbaikan sebelum acara," katanya.

Dikatakannya lagi, sebanyak 18 kuda sudah datang dari 50 kuda yang akan bertanding pada pacuan kuda nantinya.

"Jumlahnya akan bertambah jelang event nanti. Pada pacuan kuda itu, joki kuda setiap daerah akan menggunakan warna khas masing-masing. Padang Panjang memakai warna hijau, Batusangkar Kuning, dan Agam Merah. Itu akan me-

narik. Jadi, dari warna baju orang akan tahu," ujarnya.

Sementara itu, Walikota Padangpanjang Fadly Amran meminta Lomba Pacu Kuda Padangpanjang, Batipuh, X Koto (Pabasko) itu, bisa benar-benar mencerminkan Alek Anak Nagari Pabasko.

Fadly Amran yang juga Ketua Umum Pordasi Padangpanjang, meminta panitia pelaksana untuk berkolaborasi dengan semua pihak. Ia meminta OPD terkait untuk ikut serta langsung dalam kepanitiaian agar event ini benar-benar teremas dengan baik.

"Panitia selain harus bisa berkoordinasi dengan ninik mamak karena ini memang

alek anak nagari, panitia juga harus bisa berkoordinasi dengan Forkopimda, khususnya Polres untuk perizinan dan pengamanan," sebutnya.

Fadly berharap event ini bisa menjadi momen silaturahmi ninik mamak, masyarakat se-Pabasko. Yang mana acara ini juga akan mengundang ninik mamak kerapatan adat yang ada di Pabasko.

Ia juga menginstruksikan kepada OPD terkait untuk bisa mempersiapkan yang memang dibutuhkan. Di antaranya infrastruktur, track pacuan, dan lainnya untuk kelancaran dan suksesnya Lomba Pacu Kuda ini. (ned)

Padangpanjang Terima Bagi Hasil Pajak Rp3,1 M

Guguk Malintang, Rakyat Sumbar—Kepatuhan dan ketaatan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat, terutama dalam membayar pajak kendaraan dinas, mendapatkan reward dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar. Pemko Padangpanjang mendapatkan dana bagi hasil pajak dari Pemprov senilai Rp3,1 miliar.

Kota Padangpanjang, termasuk dari tujuh kabupaten/kota yang berhasil mencapai target dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor milik pemerintah yang berujung pada penyerahan dana bagi hasil ini.

Penyerahan dana bagi hasil pajak tersebut, diterima Wakil Wali Kota, Drs. Asrul yang didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Dr. Winarno, M.E, Kepala Kantor UPTD Samsat Padangpanjang, Mistar, S.Sos, MM dari Gubernur Sumbar, H. Mahyeldi, S.P Datuak Marajo. Dana diserahkan dalam acara Penyerahan SK Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan I tahun 2022 dan Launching Inovasi Samsat Wisata serta Samsat Terminal di Pelataran Jam Gadang Bukittinggi, Sabtu (4/6).

Wawako Asrul menyampaikan, Kota Padangpanjang merupakan daerah yang ketiga mencapai realisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam melaporkan ke Pemprov.

"Dana kita dapatkan hari ini merupakan buah kerja keras semua pihak yang ada di Pemko termasuk Samsat. Semoga hal ini dapat memotivasi masyarakat dalam membayarkan pajak. Sebab bagaimanapun juga, pajak merupakan kewajiban kita kepada negara," kata Asrul.

Dana dari provinsi, lanjut Asrul, disalurkan kepada kabupaten/kota apabila telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak milik Pemerintah Kabupaten/Kota minimal 90% pada triwulan tahun berkenaan.

Kepala Dinas Pendapatan Sumbar, Maswar Dedi,

A.P, M.Si dalam laporannya menyampaikan, penyerahan dana bagi hasil hanya diserahkan kepada tujuh daerah. Ini lantaran dinilai dari 19 kabupaten/kota yang ada, tujuh daerah ini yang telah sesuai dengan regulasi serta memenuhi kriteria untuk diserahkan dana bagi hasil. Selain Padang Panjang, yaitu Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi, Pariaman, Solok, Kabupaten Sijunjung dan Tanah Datar.

"Sesuai dengan Pergub No 11 Tahun 2018 Pasal 13 Ayat 5, menyebutkan bahwa dana bagi hasil pajak provinsi dapat disalurkan kepada kabupaten/kota apabila pemerintah kabupaten/kota telah menyelesaikan kewajibannya dalam membayar pajak milik Pemkab/Pemko minimal 90 persen dalam tahun berkenaan. Maka dengan demikian, diucapkan terima kasih kepada tujuh kabupaten/kota yang telah melaksanakan kewajibannya dengan kerja keras sehingga mampu mencapai target yang ditentukan," jelas Maswar.

Sementara itu, Gubernur Mahyeldi menyampaikan, pemerintah seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor milik pemerintah. Bagaimana bisa masyarakat patuh dalam membayar pajak, jika pemerintahnya sendiri lalai dalam membayarkan pajaknya.

Untuk itu, katanya, diberikan apresiasi kepada tujuh kepala daerah kabupaten/kota yang telah menunaikan pajak untuk mobil plat merah. Sehingga menjadi yang terdepan dari 12 kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat.

"Tujuh pemerintah kabupaten/kota telah bekerja dengan baik dalam membayarkan pajak milik pemerintah, maka sudah seharusnya Pemprov memberikan apresiasi maksimal kepada daerah tersebut, dengan menyerahkan dana bagi hasilnya. Diharapkan 12 kabupaten/kota lainnya juga dapat mencontoh keseriusan dari tujuh kabupaten/kota yang mendapat dana bagi hasil pada hari ini," papar Mahyeldi. (ned)



KLIPING BERITA PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nama Media : Harian Rakyat Sumbar

Padangpanjang Optimis Raih KLA Kategori Utama

Silaing Bawah, Rakyat Sumbar—Kota Padangpanjang optimis bisa meraih Kota Layak Anak (KLA) kategori Utama usai mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) KLA. Dimana, sebelumnya kota berjuluk Serambi Mekah itu masih berstatus Madya.

VLH KLA ini dilakukan tim verifikasi KLA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang dihadiri Walikota Padangpanjang Fadly Amran via zoom meeting dan diikuti secara langsung oleh Wakil Walikota Asrul, Sekdako Sonny Budaya Putra dan Kepala Bappeda Rusdianto, sekaligus ketua Gugus Tugas KLA Kota Padangpanjang.

"Selama empat tahun Padangpanjang berada di kategori Madya. Pada tahun ini kami optimis Padangpanjang bisa naik ke kategori Utama dengan melakukan beberapa kegiatan khususnya dalam membenahi



TIM Persiapan Verifikasi Lapangan Hybrid Kota Layak Anak foto bersama usai pelaksana VLH KLA oleh Kementerian PPPA.

struktur Forum Anak dan Gugus Tugas KLA sampai tingkat kelurahan," sebut Fadly Amran dalam sambutannya.

Selain itu, dalam usaha mewujudkan KLA, Fadly mengatakan, Pemko melalui Gugus Tugas juga berusaha menjadikan fasilitas-fasilitas dan infrastruktur di Kota Padangpanjang menjadi

layak anak. Seperti sekolah, taman, tempat perbelanjaan dan rumah ibadah.

"Dari beberapa tahun terakhir, kami juga sudah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Jadi KLA ini bukan hanya tugas dari pemerintah saja, tapi bagaimana kita bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder. Supaya anak-anak kita ini

betul-betul bisa mendapatkan fasilitas dan kenyamanan hidup di Kota Padangpanjang," tuturnya.

Dalam kegiatan VLH KLA ini, juga dilakukan pemaparan program KLA oleh Rusdianto yang menjelaskan terkait kebijakan strategis tentang anak, legalitas formal KLA Padangpanjang, kelembagaan, gambaran KLA Kota Padangpan-

jang yang merujuk pada 5 klaster dan kecamatan/kelurahan layak anak.

"Kita sudah mengikuti penilaian mandiri dengan hasilnya kita dapat gambaran yang baik. Namun ada beberapa masukan dari Tim Verifikasi untuk melengkapi data-datanya yang akan kita lengkapi dalam satu atau dua hari ini. Dengan harapan dari Madya kita bisa langsung naik ke Utama," sebut Rusdianto.

Usai penilaian, Wawako Asrul juga meminta Gugus Tugas KLA bersama dinas terkait untuk bisa melengkapi semua data-data sesuai dengan masukan yang disampaikan Tim Verifikasi Kemen PPPA.

"Alhamdulillah, dari semua pertanyaan Tim Verifikasi, bisa terjawab dengan baik. Sekarang bagaimana kita bisa melengkapi data yang diminta oleh tim. Kita berharap dan optimis, kategori Utama ini bisa kita raih," ucapnya. (ned)

121 Murid SDIT Juara Wisuda Tahfiz

Guguk Malintang, Rakyat Sumbar — Sebanyak 121 murid SDIT Juara mengikuti Hafiah Akhirussanah, Khotmil Qur'an dan Wisuda Tahfiz tahun ajaran 2021/2022 yang digelar di Auditorium Boestanul Arifin Adam Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang, Ahad (5/6).

Tahun ini merupakan Wisuda Tahfiz dengan peserta terbanyak sepanjang pelaksanaannya. Dari 121 murid ini, terdapat 72 orang khatam Alqur'an dan 112 Wisuda Tahfiz yang di antaranya satu orang wisuda 7 Juz dan 19 orang wisuda 2 Juz serta 101 wisudawan Juz 30.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, keuangan dan Pembangunan Setdako Padangpanjang Zulkifli mengapresiasi guru SDIT yang telah berjuang mendidik dan membimbing murid-muridnya.

"Kita sangat bangga dan bersyukur, SDIT terus memperlihatkan perkembangannya setiap tahun. Kepada wisudawan dan wisudawati, kami berharap untuk selalu meningkatkan terus hafalannya. Karena menghafal Alqur'an bukanlah titik akhir, tapi awal untuk menjadi sebaik-baiknya umat," ungkapnya.

Disampaikannya, Pemko senantiasa selalu mendorong terlaksananya



PELAKSANAAN Khotmil Quran dan Wisuda Tahfiz SDIT Juara Padangpanjang di auditorium ISI Padangpanjang.

program-program keagamaan terutama pendidikan keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Ini sejalan dengan visi Kota Padang Panjang untuk menjadi kota yang bermarwah dan bermartabat.

"Ini dituangkan dalam program kerja Pemko, mendorong tumbuh dan berkembangnya program Tahfidz melalui lembaga dan Kampung Tahfidz. Selain itu juga ada program Smart Surau, wirid remaja, serta magrib mengaji," jelasnya.

Pimpinan Perguruan Islam Juara, Ustadz Dalvi, M.Pd.I menyebutkan, SDIT Juara telah berjalan selama 11

tahun. Rata-rata alumni SDIT lebih 80 persen melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren.

"Di SDIT kita bertekad untuk jayanya agama Allah. Bagaimana anak-anak kita mencintai agama dan ibadahnya. Kita akan terus berupaya memberikan yang terbaik untuk anak-anak di SDIT Juara ini," sebutnya.

Pihaknya juga mengapresiasi Pemko Padangpanjang yang selalu men-support SDIT Juara.

"Tahun ini, Pemko juga memberikan bantuan hibah Rp100 juta untuk SDIT," ungkapnya.

Pihaknya terus berbenah serta

komit menghadirkan guru-guru

Hebat di SDIT guna melahirkan murid yang berprestasi.

"Setiap tahun kita pilih guru terbaik. Akan ada reward bintang emas. Tiga tahun berturut-turut jadi guru terbaik, maka akan kita umrahkan. Guru kita di SDIT Juara harus mengaji 1 Juz dan Salat Dhuha setiap hari," ucapnya.

Sementara itu, Kepala SDIT, Ustadz Edi Sofyan menyebutkan, SDIT Juara merupakan salah satu sekolah swasta dengan murid terbanyak di Padang Panjang. "Saat ini ada sekitar 400 orang anak didik kita. Kita berharap anak-anak kita di SDIT mempunyai akidah yang kuat. Program yang dilaksanakan di SDIT untuk meningkatkan akidah, keteladanan, agama, itulah kebiasaan yang ditanamkan sehari-hari," terangnya.

Dalam kesempatan ini juga diserahkan penghargaan bagi guru terbaik

SDIT yaitu Yola Yuliani, Yeni Andriani dan Rahayu Oktavian. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada beberapa peserta Wisuda Tahfiz terbaik masing-masing cabang. Salah satu penerima penghargaan terbaik dengan hapalan 7 Juz atas nama Habib Azanul Haqqi. (ned)



Nama Media : Harian Rakyat Sumbar



WALIKOTA Padangpanjang Fadly Amran ketika memaparkan Program Papa Bangkit 21 di hadapan peserta ISPE 2022 di Denpasar Bali.

Fadly Amran Paparkan Program Papa Bangkid'21 untuk Upgrade UMKM

Pada Ajang ISPE 2022 di Denpasar

Denpasar, Rakyat Sumbar— Walikota Padangpanjang Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano mendapat aplaus meriah dari peserta Forum Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 di Denpasar Bali, Jumat (3/6).

Hal ini terkait dengan

pemaparannya sebagai salah satu narasumber utama di ajang yang digelar Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) bekerja sama dengan Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) itu.

► Baca *Fadly...* Hal 2

Fadly Amran Paparkan Program Papa Bangkid'21...

Sambungan dari hal. 1

Mengangkat tema tentang penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui program Papa Bangkid'21 (Padang Panjang Bangun Pascacovid tahun 2021-red), Wako Fadly tampil sebanggung bersama Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, dan Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi LKPP, Gatot Pambudi Putran-

to, serta Faisal Hasan Basri, Sekjen Komunitas Sahabat UMKM.

Dalam kesempatan itu, Fadly Amran memaparkan dengan runtut bagaimana Pemko Padangpanjang dibawah kepemimpinannya bersama Wakil Walikota, Drs. Asrul serius mengangkat dan meng-upgrade UMKM supaya dapat bersaing dan sekaligus meningkatkan produktivitas ekonomi kerakyatan ini. Mulai dari kreatifitas, inovasi dan kolaborasi penguatan UMKM yang dilakukan Pemko dipre-

sentasikan walikota muda itu dihadapan peserta ISPE.

"Beberapa strategi khusus yang dilakukan sekaitan dengan pengembangan UMKM di Padangpanjang, antara lain melalui program Papa Bangkid21, dengan beberapa kebijakan. Diantaranya permodalan, fasilitasi izin usaha dan merek dagang, pemberdayaan tenaga kerja, penguatan manajemen, dan fasilitasi pemasaran," paparnya.

Selain itu, kata Fadly, kolaborasi juga dibangun Pemko Padang Panjang dalam pe-

nguatan UMKM ini sebagai upaya membangkitkan ekonomi pascapandemi. Yaitu dengan berkolaborasi bersama perguruan tinggi, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota lainnya. Juga berkolaborasi dengan pihak perbankan dan penyedia platform marketplace, serta stakeholder terkait lainnya di Kota Padangpanjang.

Fadly juga memaparkan beberapa data konkret tentang perkembangan UMKM tahun 2020-2021 saat Covid-19 mewabah. Beberapa strategi khu-

sus dalam menangani dampak pandemi Covid-19 terhadap kemajuan UMKM, tantangan besar UMKM Padang Panjang dalam menghadapi arus globalisasi ekonomi dan sebagainya.

Acara ini diikuti seluruh wali kota se-Indonesia yang tergabung dalam Apeksi dan para pelaku usaha pengadaan seluruh Indonesia. Turut mendampingi, Kabag Tata Pemerintahan Setdako, Drs Reflis, MTP dan Tim Percepatan Pembangunan, Dr. Haris Satria, M.Sn. (ned)



KLIPING BERITA Pemerintah Kota Padang Panjang Dinas Komunikasi dan Informatika

Nama Media : Harian Rakyat Sumbar

Hearing Komisi I dan Komisi III DPRD Kota Padangpanjang dengan Mitra Pertanyakan Revisi RTRW Hingga Zonasi PPDB

SEBAGAI bentuk pengawasan yang dilakukan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangpanjang terhadap kinerja pemerintah daerah, Komisi I dan Komisi III DPRD setempat menggelar hearing dengan mitra masing-masing komisi di Gedung DPRD, Senin (30/5).

Untuk Komisi I, Hearing yang dibuka oleh Ketua DPRD Kota Padangpanjang Mardiansyah, A.Md dan dihadiri Wakil Ketua Komisi Drs. Aditiawarman, Sekretaris Komisi Yandra Yane, SE., Anggota Riza Aditya Nugraha, SH., Micko Kirstie, S.Psi dan Drs. Nasrul Efendi. Juga dihadiri oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Iriansyah Tanjung, SEM.Si dan jajaran Dinas PUPR.

Dalam pertemuan tersebut, isu yang paling mengemuka dan menjadi bahasan masyarakat, tentang rencana Revisi *Tata Ruang Wilayah (RTRW)* Kota Padangpanjang tahun 2021-2041.

Dimana, dalam perubahan tersebut, ada penambahan lahan pemukiman dan alih fungsi lahan produktif dalam mendukung ketersediaan lahan pemukiman yang kian terus meningkat kebutuhannya.

"Kita minta kepada Dinas PUPR untuk betul-betul mengkaji lahan-lahan mana yang akan mengalami perubahan status dan tetap mempertimbangkan ketersediaan lahan pertanian, selain pertimbangan kebutuhan lahan pemukiman yang terus meningkat," sebut Mardiansyah.

Dikatakan Mardiansyah, sebagai daerah yang hanya memiliki luas sekitar 23 KM persegi, tentunya kebutuhan lahan pemukiman sangat mendesak seiring pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Widya Kusuma, ST dalam pertemuan tersebut memaparkan alasan-alasan terkait perubahan RTRW dan adanya perubahan RTRW terkait jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) termasuk kawasan di sepanjang jalur kereta api (KAJ).

Ditambahkan Assisten II Bidang Perekonomian dan



SUASANA hearing Komisi I DPRD dengan Dinas PUPR Kota Padangpanjang.



ANGGOTA DPRD Aditiawarman ketika menyampaikan aspirasi masyarakat.



Novi Hendri
ANGGOTA DPRD



Herman
ANGGOTA DPRD



Riza Aditya Nugraha
ANGGOTA DPRD



ANGGOTA DPRD Yandra Yane mempertanyakan sejumlah kebijakan yang dilakukan Dinas PUPR.



Nasrul Efendi
ANGGOTA DPRD



Yudha Prasetya
ANGGOTA DPRD



Idris Al Hafiz
ANGGOTA DPRD



Kiki Anugerah Dia
ANGGOTA DPRD



ANGGOTA DPRD Hukemri ketika menyampaikan aspirasi terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pembangunan Setdako Padangpanjang Iriansyah Tanjung, SEM.Si, adanya masalah SK batas wilayah yang belum keluar hingga saat ini juga menjadi kendala dalam revisi Perda RTRW Kota Padangpanjang Tahun 2021-2041.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi I menyimpulkan, akan melanjutkan dengan pembahasan Terkait revisi RTRW selanjutnya tanpa ada perubahan batas wilayah dan menunggu SK batas wilayah dari Kemendagri. Komisi I meminta bahan berupa data lengkap disamping peta juga data rekap perubahan, penjelasan dari jumlah alih fungsi lahan per kelurahan.

Komisi III Bahas PPDB
Komisi III DPRD Kota Padangpanjang yang membicarakan Pendidikan, Kesehatan dan Kesra tersebut melakukan hearing dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (31/05).

Hearing yang dipimpin Ketua Komisi III Idris, S.Pd.i

tersebut membahas tentang persiapan dan kendala dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan masalah tenaga kependidikan seiring diatapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Disampaikan Ustad Idris, Komisi III meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengkaji ulang jangkauan donasi PPDB mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA.

"Kita tidak menginginkan adanya masyarakat kita yang tidak diterima di sekolah-sekolah yang sebetulnya dekat dari tempat tinggalnya. Tetapi, karena adanya zonasi ini, mereka tereliminir. Seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya," sebut Idris.

Ditambahkan Wakil Ketua Komisi III Hukemri, permasalahan zonasi ini terus terjadi setiap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP dan SMA.

"Karena kewenangan SMA berada di

provinsi, kita minta Dinas Pendidikan untuk mengkaji ulang zonasi PPDB SMP. Sehingga, tidak ada lagi masyarakat yang mengadu karena anak mereka tidak bisa masuk ke sekolah negeri, padahal tinggalnya berada satu kelurahan dengan sekolah setempat," ingat Hukemri.

Untuk PPDB di tingkat SMA, meskipun wewenang provinsi, Komisi III meminta Disdikbud bisa berkordinasi dengan Provinsi sehingga warga Padangpanjang dapat diterima di Sekolah-sekolah Unggul.

Selain itu, Komisi III berharap Disdikbud mencari solusi untuk tenaga kependidikan honoror terkait dengan diatapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.

"Jangan sampai, setelah diberlakukan aturan tidak diperbolehkannya mengangkat tenaga honoror untuk tenaga kependidikan, sejumlah sekolah akan mengalami kekurangan guru. Apalagi, dari sejumlah informasi yang ditemukan oleh Komisi III, cukup banyak sekolah yang memanfaatkan tenaga kependidikan dari honoror karena keterbatasan guru PNS," sebut Anggota Komisi III Dr. Novi Hendri, SEM.Si

Terpisah, Ketua DPRD Kota Padangpanjang Mardiansyah, A.Md ketika ditemui usai hearing Komisi I dan Komisi III tersebut menyatakan, sebagai lembaga pengawasan, DPRD menyampaikan berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, dengan memanggil

dan meminta keterangan dari OPD sebagai mitra dari masing-masing Komisi DPRD.

"Setelah Komisi I mempertanyakan tentang sejauh mana revisi RTRW yang dilakukan oleh Dinas PUPR serta kendala yang dialami. Sehingga, kita juga bisa menyampaikan kepada masyarakat, ini lho permasalahan yang revisi RTRW tersebut bisa juga bisa dilaksanakan meskipun telah hampir satu tahun direncanakan," jelasnya.

Begitupun dengan Komisi III, lanjutnya, zonasi PPDB sudah menjadi permasalahan klasik yang terus terjadi setiap penerimaan siswa baru. Ini harus dicari solusi, jangan sampai masyarakat kebingungan dengan peraturan zonasi yang berubah-ubah setiap ada penerimaan siswa baru.

"Kamipun di DPRD, sering menjadi sasaran masyarakat. Malahan, ada yang sudah meminta tolong melalui anggota, tetapi anak mereka juga tidak bisa bersekolah di tempat yang dituju. Sementara, ada kebijakan pemerintah untuk wajib pendidikan 12 tahun, kan jadi tumpang tindih," ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Mardiansyah juga berharap, dengan intensnya pertemuan dengan OPD, bisa meringankan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya menyangkut hal-hal yang mendasar, seperti ekonomi, pendidikan dan kesehatan. (ned)



KETUA DPRD Kota Padangpanjang Mardiansyah ketika menggelar hearing dengan Dinas PUPR.



Nama Media : Harian Koran Padang

Gelanggan Bancah Laweh Mulai Dijajal

Padang Panjang, Khazanah-- Kuda pacuan yang berasal dari sejumlah daerah di Sumatera Barat, mulai berdatangan dan menjajal lintasan Pacuan Kuda Bancalaweh.

Terlihat, para joki yang menunggangi kuda itu melakukan latihan sebagai persiapan menuju iven akbar Pacu Kuda Alek Anak Nagari Padangpanjang, Batipuah, X Koto (Pabasko), 22 hari mendatang. Latihan dimulai 07.30-09.00 WIB.

Ketua Panitia Pacu Kuda, Delius Putra mengatakan, kuda yang mulai datang itu di antaranya dari Solok, Bukittinggi dan Payakumbuh. Sementara yang mulai menjajal latihan yaitu dari Kota Padang dan Kota Padangpanjang.

"Di minggu-minggu ini, kuda pacuan mulai berdatangan dan akan melakukan latihan setiap harinya jelang event akbar itu. Hari ini dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) juga melakukan survey track pacuan. Mungkin ada perbaikan-perbaikan sebelum acara," katanya.

Dikatakannya lagi, sebanyak 18 kuda sudah datang dari 50 kuda yang akan bertanding pada pacuan kuda nantinya.

"Jumlahnya akan bertambah jelang event nanti. Pada pacuan kuda itu, joki kuda setiap daerah akan menggunakan warna khas masing-masing. Padang Panjang memakai warna Hijau, Batusangkar Kuning, dan Agam Merah. Ini akan menarik. Jadi, dari warna baju orang akan tahu," ujarnya.

Paulhendri



Nama Media : Harian Koran Padang

PKK Ngalau Dinilai Tim Penilai Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi

PADANGPANJANG, KP - PKK Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padangpanjang Timur, dinilai Tim Penilai Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Jumat (3/6). Kegiatan pembukaan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Walikota dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan.

Rombongan Tim Penilai yang diketuai Wakil Ketua TP PKK Sumbar, dr. Fitria Amalia Umar Audy Joinaldy itu, disambut Wakil Walikota Padangpanjang, Asrul, Asisten III Setdako, Martoni, Ketua TP PKK Kota Padangpanjang, dr. Dian Puspita Fadly Amran dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dokter Fitria menyampaikan, penilaian ini merupakan evaluasi terhadap gerakan PKK yang ada di setiap daerah. Sekaligus memberikan pembinaan langsung oleh tim penilai provinsi kepada pengurus PKK kota, kecamatan dan kelurahan.

Ada lima kategori yang akan dinilai dalam Lomba Gerakan PKK provinsi ini. Di antaranya Lomba Tertib Administrasi PKK, Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja (Pokja I), Lomba Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga atau UP2K PKK (Pokja II), Lomba Aku Hatinya PKK (Pokja III) dan Lomba PHBS Plus (Pokja IV). "Kelimanya dinilai tim. Tunjukkanlah kepada juri kalau Padangpanjang bisa jadi yang terbaik," sebutnya.

Sementara itu Wawako Asrul menyampaikan, perlombaan ini tidak hanya sekadar ajang

perlombaan, melainkan juga ajang untuk memperlerat tali silaturahmi.

Selain itu perlombaan ini juga untuk melihat sejauh mana PKK sudah menjalankan 10 program pokoknya.

Ditambahkan Asrul, perlombaan ini bisa untuk mengukur dan meningkatkan keompakan kader dalam menjalankan program pokok PKK. "Saya berharap Kelurahan Ngalau bisa memberikan hasil yang terbaik, dan menjadi juara," ujarnya.

Sedangkan Dokter Dian mengatakan, Gerakan PKK adalah suatu gerakan pembangunan masyarakat yang berasal dari, untuk dan oleh masyarakat. Tujuannya untuk menciptakan keluarga yang bertaqwa, keluarga yang mempunyai akhlak mulia dan berbudi luhur, keluarga yang sehat sejahtera, maju, mandiri. Dan, keluarga yang memiliki kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Hingga saat ini, katanya, kader PKK Kota Padangpanjang selalu giat menjalankan 10 program pokok PKK. Salah satunya mencegah stunting.

"Alhamdulillah, dalam menjalankan perannya, kader PKK kami tetap gigih dan terus me-



WAKIL Ketua TP PKK Provinsi Sumbar, dr. Fitria Amalia Umar Audy Joinaldy didampingi Ketua TP PKK Kota Padangpanjang, dr. Dian Puspita Fadly Amran turun ke lapangan dalam penilaian Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi di Padangpanjang, Jumat (3/6).

tingkatkan inovasi dalam menjalankan program PKK. Saat ini Kelurahan Ngalau menjadi pilihan kami untuk dinilai, semoga bisa jadi yang terbaik nantinya," harap Dian.

Dengan diadakannya lomba ini, tambahna,

tentu akan memberikan penghargaan dan juga pengakuan terhadap kader-kader PKK, serta juga akan meningkatkan dan memotivasi kader untuk mewujudkan inovasi yang lebih banyak lagi dalam program PKK. (kom)

KELUARKAN SURAT EDARAN

ASN Diminta Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Adminduk

PADANGPANJANG, KP - Dalam wirid Korpri rutin yang diikuti ASN di lingkungan Pemko Padangpanjang, Jumat (3/6) di Islamic Center, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mengajak ASN untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan (Adminduk).

Kepala Disdukcapil Padangpanjang, Maini menyampaikan pentingnya dokumen, data kependudukan, dan manfaatnya.

Dikatakannya, untuk dokumen kependudukan secara nasional, kita sudah di atas target. Namun masih ada yang belum maksimal yaitu dokumen Kartu Identitas Anak (KIA). Dari 18.441 anak usia 0 sampai 17 tahun kurang satu hari,

sudah 85 persen yang sudah memiliki KIA ini.

"Karena KIA ini adalah KTP anak-anak yang harus dibawa ke manapun, kami berharap kepada kita bersama untuk dapat menyampaikannya kepada masyarakat akan pentingnya KIA ini. Untuk KIA sebenarnya Padangpanjang sudah di atas target nasional juga. Nasional 40 persen, kita sudah 85 persen. Namun harapan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk Padangpanjang diharapkan akhir tahun 2022 ini di atas 95 persen. Ini yang akan kita tingkatkan," ungkap Maini.

Ia berharap, melalui dukungan semua lapisan masyarakat, pihaknya akan berupaya dengan berbagai strategi untuk layanan KIA kepemilikannya bisa di atas 95 persen di Kota Padangpanjang. (kom)



Nama Media : Mingguan Sumbar Post

Wako Lantik Pejabat Fungsional di Lingkup Pemko

Padang Panjang - Sebanyak 40 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilantik dan diambil sumpahnya oleh Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano di Hall Lantai III Balai Kota, Senin.

Mereka terdiri dari 29 Pejabat Fungsional Penyetaraan dan 11 Pejabat Fungsional Pengangkatan Pertama untuk Guru, Perawat dan Apoteker.

Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan ini, juga merupakan lanjutan dari sisa beberapa ASN yang belum dilakukan penyetaraan jabatan.



Sebagai implementasi kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan

Diskominfo Padang Panjang Dukung Perhelatan Pacuan Kuda Alek Nagari

Padang Panjang - Sukseskan perhelatan Pacuan Kuda Alek Nagari Pabasko (Padang Panjang, Batipuah, X Koto) 2022 di Kota Padang Panjang, Panitia Pelaksana datang dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Kedatangan tim dari Pordasi ini, Senin, diterima Kabid Informasi dan Komunikasi (IKP) Kominfo, Maryulis Max, S.Sos, M.I.Kom.

Ketua Pelaksana Pacuan Kuda, Delius Putra menyampaikan, pihaknya berkeinginan agar Kominfo bisa memfasilitasi

kegiatan ini. Mulai dari publikasinya, video, foto serta jaringan internet agar kegiatan semakin meriah dan beritanya sampai ke masyarakat luas.

"Kita inginkan kegiatan ini benar-benar sukses dan meriah dari segi apapun. Kalau bisa booming, tidak hanya di Sumatera Barat saja, tapi juga mendunia. Event ini berbeda dari pacuan kuda yang sudah pernah kita laksanakan," ujarnya.

Tidak hanya itu saja, Delius dan rekan-rekan juga mewacanakan

perhelatan yang akan dilangsungkan 26 Juni mendatang di Lapangan Pacu Kuda Bancalaweh ini, juga akan diadakan lomba vlog dan lomba foto.

Terkait ini, Maryulis Max menyebutkan, Kominfo siap 100% mendukung terselenggaranya pacuan kuda ini. "Karena ini adalah alek kita bersama yang notabene memiliki multiplier effect bagi pengembangan olahraga dan juga akan berpengaruh secara sosial ekonomi bagi masyarakat," tuturnya. (*//AA)

Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Wako Fadly dalam sambutannya mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, merupakan sebuah proses penyederhanaan birokrasi yang menjadi suatu bagian dari amanat presiden guna pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Kegiatan ini, lanjut Fadly, merupakan komitmen Pemerintah Kota untuk mewujudkan adanya perubahan konkret dalam reformasi birokrasi. Di mana perlunya penyederhanaan birokrasi pada instansi pemerintah cukup dengan dua level. Diganti dengan jabatan fungsional yang menekankan pada keahlian dan kompetensi, sehingga proses kerja di birokrasi lebih cepat dan lebih dinamis dalam pengambilan keputusan.

"Saudara-saudara harus memiliki kebanggaan menduduki jabatan fungsional, apapun tugas dan klasifikasinya. Kebanggaan terhadap tugas yang menjadi tanggung jawab setiap pejabat fungsional, tentu berdampak positif terhadap kinerja yang bersangkutan, kinerja perangkat daerah, dan kinerja Pemerintah Kota. Sebuah anugerah bagi pejabat fungsional yakni bekerja secara mandiri, mulai dari

perencanaan kegiatannya hingga evaluasi pelaksanaan kegiatan," ujarnya.

Wali kota muda ini juga menyebutkan, untuk memaksimalkan kompetensi pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional, kepala OPD harus melakukan pendampingan sehingga dapat memperlancar pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Fadly mengucapkan selamat bekerja kepada para pejabat fungsional yang baru dilantik, dan berharap dapat segera beradaptasi dengan jabatan fungsional di lingkungan kerja masing-masing.

"Saya berharap, saudara-saudara sekalian dapat menjalankan amanah yang diberikan dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Mari kita bergerak bersama dan menjaga sinergitas, dalam berbagai program pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Kota Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat. Saya percaya, dengan kompetensi yang saudara miliki, dan dibarengi dengan kerja keras kita semua, perubahan ke arah yang lebih baik dapat segera kita capai," pungkasnya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, asisten, staf ahli, serta kepala OPD.

KLIPING BERITA



Kominfo Padang Panjang



Jalan Prof. M. Yamin Nomor 2



diskominfo.padangpanjang@gmail.com